



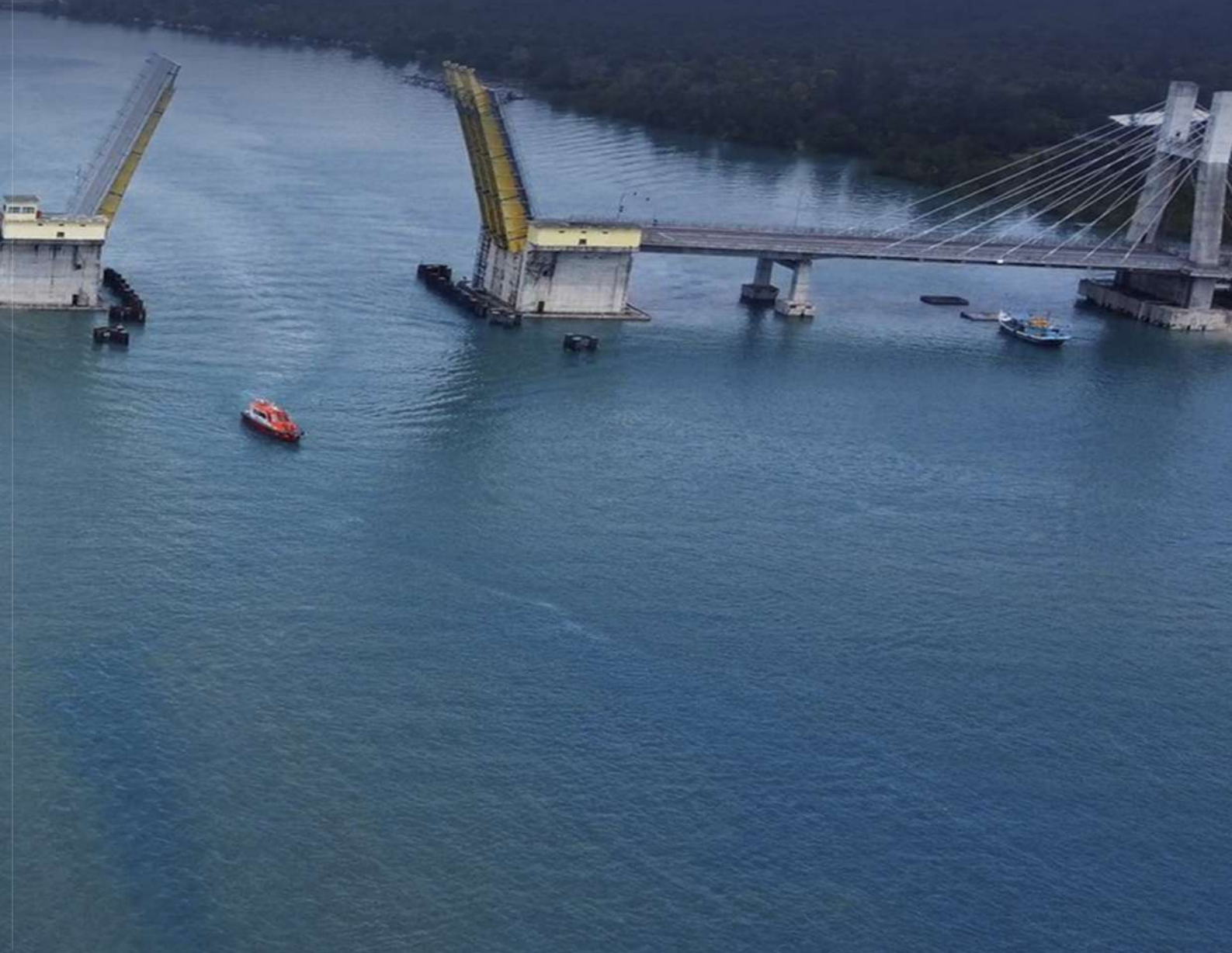
Kota Pangkal Pinang

P-RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2025

**“Pemerataan Kesejahteraan dan
Daya Saing Sumber Daya Manusia”**





WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan perubahan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman kepada RPD Tahun 2025-2026, RKP Tahun 2025, serta Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025.

BAB III SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

- (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan I tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. penutup.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Mei 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNU IBNU DIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,


MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 277



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

Pertumbuhan ekonomi Babel pada tahun 2024 hanya mencapai 0,77 persen, membuat target pertumbuhan 2,20 persen di tahun 2025 terasa sulit dicapai. Dampak kasus korupsi timah masih terasa, termasuk dalam kebijakan tata kelola tambang yang baru. Meskipun harga timah, kelapa sawit, dan lada menunjukkan tren positif, prospek ekonomi Babel tetap perlu diperhatikan, terutama dengan kebijakan pengetatan fiskal. Kinerja ekspor pertambangan dan penggalan yang mendominasi ekspor Babel masih rentan terhadap fluktuasi harga timah dan kebijakan baru. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 berpotensi membatasi anggaran negara dan berdampak pada program-program yang telah direncanakan.

Perekonomian Kota Pangkal Pinang di tahun 2025 diperkirakan akan terdampak situasi politik dan ekonomi nasional serta internasional. Situasi politik di tahun ini diprediksi akan menghambat investasi, karena investor akan menahan diri sementara waktu sampai adanya kejelasan kepemimpinan. Karenanya kebijakan ekonomi disusun dengan asumsi antisipasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi di tahun 2025.

Kota Pangkal Pinang mempunyai satu kekhususan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perdagangan dan jasa di Kepulauan Bangka Belitung. Kekhususan ini menjadi peluang ekonomi yang harus dapat dimanfaatkan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkal Pinang.

Beberapa permasalahan seperti melemahnya daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga mencerminkan rendahnya pendapatan yang berdampak pada ekonomi domestik. Selain itu tingginya angka pengangguran terbuka, dan partisipasi perguruan tinggi juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

3.1.4 Target Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2025

Capaian indikator makro ekonomi Kota Pangkal Pinang tahun 2024 memperlihatkan kinerja yang baik. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan, akan



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

tetapi indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan dan angka kemiskinan mengalami penurunan.

Indikator makro ekonomi mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator ini juga menjadi bagian dari indikator kinerja utama pemerintah daerah.

Dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah, di tahun 2025 diperkirakan tidak ada lonjakan besar dalam penambahan pendapatan daerah ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 berpotensi membatasi anggaran negara dan berdampak pada program-program yang telah direncanakan. Karenanya, target indikator makro dirumuskan dengan mempertimbangkan keterbatasan pendanaan. Selain itu, rumusan target juga memperhatikan target akhir RPD yang sudah ditetapkan. Berikut ini disajikan kondisi eksisting dan proyeksi serta target indikator makro ekonomi.

Tabel III.2

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2026

No	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET	
				2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,90	81,2	81,5
2.	Ratio Gini	Nilai	0,292	0,285	0,223
3.	Laju Inflasi	%	0,76	1 ± 2	1 ± 2
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,3	1,2	4
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,98	5,80	5,32
6.	Angka Kemiskinan	%	4,04	4,02	3,8
7.	PDRB per kapita	Rp (Juta)	82,18	90,84	96,23

Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang (2020-2024)

Bapperida Kota Pangkal Pinang, Proyeksi (2025-2026)

3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok arah kebijakan pembangunan umum Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi